

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Indonesia melaksanakan pembangunan baik secara nasional maupun secara regional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan regional merupakan bagian dari sub sistem pembangunan nasional. Menurut Adisasmita (2005), pembangunan regional (wilayah) merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Selama ini, pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan wilayah pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Firman, 1996). Sehingga untuk mengukur perkembangan wilayah dapat menggunakan indikator ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008).

Pembangunan atau kegiatan modernisasi yang dilakukan mengakibatkan aktivitas perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia pun semakin beragam dan dinamis. Dimulai dengan kemunculan aktivitas ekonomi baru diiringi dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang sudah ada. Pertumbuhan sektor industri dan jasa semakin pesat. Namun, sektor pertanian yang pada awalnya dominan, produktivitasnya menjadi semakin menurun. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya transisi ekonomi. Transisi ekonomi juga menjadi salah satu indikator yang biasanya digunakan oleh lembaga internasional untuk mengetahui adanya pembangunan dan perkembangan ekonomi. Definisi transisi ekonomi yaitu perubahan struktur ekonomi tradisional (sektor pertanian) menuju ekonomi modern (sektor industri atau jasa). Indonesia yang dulunya merupakan negara agraris, saat ini sebagian besar wilayahnya sudah mengalami industrialisasi. Hal ini menandakan bahwa banyak wilayah di Indonesia telah mengalami transisi ekonomi.

Dalam pembangunan regional dikenal dua model pembangunan berdasarkan faktor produksinya yaitu pembangunan eksogen dan pembangunan endogen. Pembangunan eksogen merupakan istilah yang digunakan dalam mengungkapkan pembangunan modernisasi atau westernisasi (Jan, 2001). Dalam pembangunan eksogen, faktor-faktor yang berperan dalam pembangunan terdapat di luar daerah. Menggunakan teknologi, modal dan sumber daya manusia yang berasal dari luar daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh luar tersebut akan berdampak pada modal sosial dan budaya lokal yang harusnya dijaga tradisinya. Kritik tersebut kemudian melatarbelakangi kemunculan model pembangunan endogen.

Pembangunan endogen merupakan kebalikan dari pembangunan eksogen. Karena penentuan faktor endogen meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan faktor-faktor eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Glasson, 1990). Bassand dalam Names (2005) mengemukakan bahwa indikator pembangunan selama ini bersifat kuantitatif, namun juga dapat menggunakan indikator kualitatif dan struktural seperti budaya, nilai-nilai sosial, politik, dan ekologi serta biaya sosial yang jangka panjang. Pernyataan tersebut juga mempengaruhi kemunculan model pembangunan endogen. Konsep pembangunan endogen sering dikaitkan dengan proses industrialisasi endogen. Selain itu, pembangunan endogen mensyaratkan adanya kapasitas masyarakat lokal (Names, 2005).

Indonesia merupakan negara yang pembangunannya bersifat eksogen dan endogen. Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan eksogen akan lebih dominan perannya. Terlebih lagi Indonesia juga merupakan anggota organisasi internasional seperti PBB, APEC dan MEA. Sehingga pengaruh faktor luar akan mudah mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Teknologi, sumber daya, dan budaya luar akan masuk. Dikhawatirkan hal tersebut dapat mempengaruhi keaslian budaya lokal dan pertumbuhan wilayah tidak berlangsung secara berkelanjutan karena tidak disesuaikan dengan karakteristik lokal. Untuk menyeimbangi hal tersebut, Indonesia juga melakukan pembangunan endogen. Salah satu bentuk dari pembangunan endogen di Indonesia adalah pembangua ekonomi lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) suatu proses dimana sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal menjalin kerjasama untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya potensial yang dimiliki (sumber daya manusia, alam dan sosial) di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely, 1994).

Jawa Tengah, merupakan salah satu provinsi yang pembangunannya tergolong pesat dibanding dengan wilayah yang ada di luar Jawa, apalagi di Indonesia bagian Timur. Walaupun perindustrian di Jawa Tengah masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat, namun sebagai penghubung kedua wilayah tersebut, Jawa Tengah sedikit banyak memperoleh keuntungan

dari aktivitas ekonomi yang ditimbulkan dari keduanya. Misalnya saja distribusi hasil produksi melalui jalur darat yang mengharuskan melewati Jawa Tengah. Keuntungan serupa juga diperoleh oleh Jawa Tengah karena berbatasan langsung dengan Provinsi D.I. Yogyakarta di bagian selatan. Selain itu, Jawa Tengah memiliki dua kutub pertumbuhan ekonomi yaitu Kota Semarang dan Kota Surakarta. Perkembangan dan pertumbuhan kedua kota tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah serta perkembangan wilayah (kabupaten-kabupaten) di sekitarnya.

Kegiatan pembangunan di Jawa Tengah menghasilkan peningkatan produktivitas PDRB secara keseluruhan. Namun, jika dilihat dari struktur ekonominya, laju pertumbuhan sektor pertanian Jawa Tengah semakin menurun. Sedangkan sektor industri dan jasa cenderung meningkat. Sektor industri pengolahan di Jawa Tengah masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 32,89 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,87 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor dominan memberikan sumbangan bagi perekonomian Jawa Tengah sebesar 19,58 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 6,06 persen (BPS Jawa Tengah, 2010). Fakta tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dikutip dari penelitian yang dilakukan Pambudi (2010) dengan menggunakan data tahun 2004-2008, kontribusi sektor non primer seperti sektor industri mengalami penurunan, sektor perdagangan cenderung mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dan sektor primer mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 31,6 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan rata-rata kontribusi kepada PDRB Jawa Tengah sebesar 21,23 persen, sedangkan sektor primer memberikan kontribusi sebanyak 19,9 persen dalam setiap tahunnya. Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa Jawa Tengah mengalami transisi ekonomi akibat adanya pembangunan, yaitu dengan bukti penurunan sektor primer dan peningkatan sektor sekunder ataupun tersier.

Dalam pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Tengah, sejak tahun 2001 pemerintah Jawa Tengah juga melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Karena ekonomi lokal merupakan salah satu penggerak roda perekonomian daerah yang perannya cukup besar. Selain itu, ekonomi lokal ini merupakan bentuk ekonomi kerakyatan, karena menitik beratkan pada sumber daya lokal, ketrampilan, pengetahuan dan inisiatif penduduk lokal. Sehingga program pembangunan ini disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik daerah tersebut. Sehingga tidak dikhawatirkan akan merubah budaya dan tradisi, serta dapat terjamin keberlanjutannya. Dasar dari Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Jawa Tengah ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/36/2001 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) Jawa Tengah Periode 2001-2003. Strategi pengembangan ekonomi Jawa Tengah tersebut ditunjang oleh tiga pilar ekonomi yaitu industri,

pertanian, dan pariwisata, Industri Kecil Menengah (IKM) juga termasuk di dalamnya. Sesuai dengan pembangunan endogen yang mensyaratkan munculnya industri endogen/ lokal (Names, 2005) serta pendapat Coffey dan Polese (1984) bahwa perkembangan ekonomi lokal dilihat dari perkembangan perusahaan lokalnya. Coffey dan Polese (1984) juga mengatakan bahwa kewirausahaan lokal juga dapat dijadikan variabel kedua yang mendasari perkembangan wilayah.

Jumlah IKM di Jawa Tengah semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jawa Tengah (2001) jumlah IKM binaan meningkat dari 40.816 unit (Tahun 2001) menjadi 41.968 unit (Tahun 2002). Jumlah aset IKM juga meningkat dari Rp. 2,938 Trilyun menjadi Rp. 7,773 Trilyun. Penyerapan tenaga kerja dari sektor ini juga mengalami peningkatan dari 190.664 orang menjadi 193.778 orang. Sedangkan pada tahun 2004, jumlah IKM di Jawa Tengah kurang lebih 6.461.428 usaha, yaitu lebih dari 15 persen dari seluruh jumlah IKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 644,1 ribu perusahaan industri kecil dan menengah pada tahun 2010 atau naik relatif kecil (0,07 persen) dibandingkan jumlah perusahaan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 2,67 juta jiwa. Nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun yang sama mencapai Rp 5.420,24 Miliar. Selama ini, program IKM di Jawa Tengah telah berhasil mewujudkan salah satu tujuan dari pembangunan, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas antar kabupaten di Jawa Tengah. Menurut data BPS, jika dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) di Indonesia, tidak terdapat kabupaten/ kota yang paling miskin ataupun paling kaya di Jawa Tengah. Sehingga Jawa Tengah dijadikan percontohan dalam pengembangan ekonomi lokal, di bidang kluster IKM, karena dapat menekan angka disparitas antar kota/kabupaten di Jawa Tengah.

Pembangunan ekonomi regional mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi suatu wilayah. Sehingga perlu diketahui transisi ekonomi yang dialami setiap kabupaten di Jawa Tengah. Apakah peran masing-masing sektor ekonomi di Jawa Tengah masih sama atau berbeda. Mengingat kondisi dan karakteristik masing-masing kabupaten di Jawa Tengah berbeda-beda. Kemudian perlu diketahui pengaruh pergeseran struktur ekonomi tersebut terhadap kontribusi masing-masing sektor ekonomi dan perkembangan ekonomi lokal di setiap kabupaten di Jawa Tengah. Dikarenakan ekonomi lokal merupakan salah satu penggerak roda perekonomian wilayah yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Selain itu perkembangan perekonomian lokal sangat pro rakyat dan dapat meningkatkan daya saing daerah, agar dapat bersaing dengan daerah lain baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya.

1.2 Masalah Penelitian

Semua Negara di dunia pasti melakukan kegiatan pembangunan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Negara berkembang, pembangunan dilakukan juga untuk menjadi negara maju, tak terkecuali di Negara Indonesia. Pembangunan di Indonesia menganut dua model, yaitu pembanguana eksogen dan pembangunan endogen. Pengaruh luar di era globalisasi sangat kuat. Dampak negatif dari faktor eksogen pembangunan adalah mempengaruhi perubahan pada nilai-nilai sosial budaya yang tertanam di Indonesia. Untuk mecegah hal tersebut, di berbagai wilayah di Indonesia telah melaksanakan pengembangan ekonomi lokal yang mempertahankan kearifan lokal.

Ekonomi lokal merupakan salah satu faktor penting penopang ekonomi daerah. Menurut Coffey and Polèse (1984), perkembangan ekonomi lokal ditandai dengan munculnya pengusaha-pengusaha lokal. Sedangkan pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan yang membutuhkan kerjasama dan peran semua aktor pembanguann secara berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jawa Tengah adalah salah satu kabupaten yang mengembangan ekonomi lokal. Sudah banyak IKM yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bahkan beberapa produk IKM tersebut merupakan produk unggulan yang sering memasok kebutuhan luar daerah bahkan luar negeri. Misalnya saja produk unggulan industri knalpot dari Kabupaten Purbalingga, produk mebel dari Kabupaten Sukoharjo dan lain sebagainya. Selain menyumbang pendapatan daerah, pengembanagn lokal di Jawa Tengah cukup menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan adanya pembangunan yang terus berlangsung di Jawa Tengah, mengakibatkan bertambahnya aktivitas ekonomi yang ada di Jawa Tengah pula. Hal tersebut menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah. Transisi ekonomi wilayah tersebut dapat mempengaruhi eksistensi perkembangan ekonomi lokal yang sudah berkembang dan tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Selain itu, dalam pembangunan daerah juga terdapat masalah yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan faktor endogennya. Untuk itu, perlu diketahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya. Seberapa besar ekonomi lokal mempengaruhi transisi ekonomi, atau sebaliknya. Selain itu, agar dapat membantu mengarahkan kebijakan-kebijakan pembangunan di Jawa Tengah yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah era globalisasi. Terlebih lagi saat ini Indoensia merupakan anggota APEC dan MEA.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya. Sedangkan sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis karakteristik perkembangan ekonomi wilayah Jawa Tengah.
2. Menganalisis perkembangan ekonomi lokal Jawa Tengah.
3. Menganalisis keterkaitan antara transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian terdapat batasan-batasan tertentu, karena tidak mungkin dilakukan penelitian di segala aspek dan semua wilayah. Tentunya ada batasan wilayah dan batasan materi yang dibahas dalam penelitian, agar lebih fokus dan mudah dalam merumuskan kesimpulan. Ruang lingkup materi digunakan untuk membatasi substansi yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini, batasan materi meliputi transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah, serta keterkaitan transisi ekonomi wilayah tersebut dengan perkembangan ekonomi lokal yang terjadi di masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Transisi ekonomi adalah pergeseran struktur ekonomi wilayah yang didominasi oleh sektor primer kemudian berkembang dan mulai bergeser menjadi sektor sekunder ataupun tersier. Sehingga pada penelitian ini analisis yang dilakukan dengan melihat struktur ekonomi kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan terjadinya pembangunan lokalitas atau pembangunan endogenus yang baik dicirikan dengan adanya perkembangan perusahaan lokal. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakteristik perkembangan ekonomi lokal Jawa Tengah, menggunakan industri kecil menengah (IKM) yang ada di kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga dalam penelitian ini, untuk menjelaskan perkembangan ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dengan melihat transisi struktur ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokalnya. Dari kedua hal tersebut akan diketahui karakteristik perkembangan ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya.

Landasan teori yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis transisi struktur ekonomi wilayah Jawa Tengah adalah Teori Rostow yaitu lima tahapan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedangkan landasan teori yang digunakan dalam menganalisis ekonomi lokal Jawa Tengah adalah Teori empat tahapan Perkembangan Ekonomi Lokal oleh Coffey dan Polèse. Kedua analisis menggunakan data tahun 2000 dan 2010 karena tahun tersebut merupakan tahun sensus dan lebih valid. Data tahun 2000 dan 2010 menjadi data acuan untuk tahun-tahun setelahnya.

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah dua puluh sembilan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Luas seluruh kabupaten di Jawa Tengah adalah 3.197.589 ha atau 98 persen dari total luas Jawa Tengah yaitu 3.254.412 ha. Letak astronomis Provinsi Jawa Tengah yaitu antara 5 40'

dan 8 30' Lintang Selatan dan antara 108 30' dan 111 30' Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah memiliki batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

Sebelah Selatan: Provinsi DI.Yogyakarta dan Samudra Hindia

Sebelah Barat : Provinsi Jawa Barat



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2011.

Gambar 1.1
Peta Ruang Lingkup Wilayah Studi

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik perkembangan ekonomi wilayah dan ekonomi lokal setiap kabupaten di Jawa Tengah melalui hasil analisis transisi ekonomi wilayah dan analisis perkembangan ekonomi lokalnya yang dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan pembangunan regional dan lokal yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sehingga kedepannya kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah,

dan meningkatkan daya saing wilayahnya. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai struktur ekonomi kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran sektor pertanian, subsektor IKM maupun subsektor koperasi dalam perekonomian masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Selain itu juga memberikan informasi mengenai kabupaten mana saja yang memiliki potensi pada sektor pertanian, IKM unggulan, ataupun sektor keuangan khususnya subsektor koperasi dalam mendukung perkembangan lokal dan regional. Hal ini juga dapat dijadikan referensi bagi pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas pembangunan sehingga alokasi anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien, serta memperbaiki sinergitas antar sektor maupun subsektor demi terciptanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan kabupaten di Jawa Tengah.

1.6 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian penelitian Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya ini, peneliti mendapat inspirasi dan referensi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu:

Tabel I. 1
Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Andi Tri Pambudi, 2010	Pergeseran Struktur Perekonomian Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Kuantitatif	Menganalisis struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2008 dan pergeseran peran sektor ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerjanya dan pertumbuhan serta kontribusi outputnya
2	Yudha Prawira dan Wahyu Hamidi, 2013	Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001-2010.	Analisis Kuantitatif	Menganalisis transformasi stuktur ekonomi dan mengidentifikasi sektor basis di Kabupaten Siak.
3	Ari Indah Pertiwi, 2015	Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan <i>Shift Share</i> di Surakarta Tahun 2008-2013.	Analisis Kuantitatif	Mengetahui struktur ekonomi daerah serta pergeseran sektor-sektor dilihat dari penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB di Kota Surakarta.
4	Shanty Oktavilia, 2011	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai Upaya Mengantisipasi Disparitas Pendapatan antar Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Kuantitatif	Mengetahui pengelompokan dan mengidentifikasi kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah yang tergolong tertinggal dan mengetahui sektor-sektor potensial sebagai salah satu pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah.
5	Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono, 2013	Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian	Analisis Kuantitatif	Mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kabupaten Malang
6	Nisa Ayunda Adni, 2016	Perkembangan Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah.	Analisis Kuantitatif	Mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya.

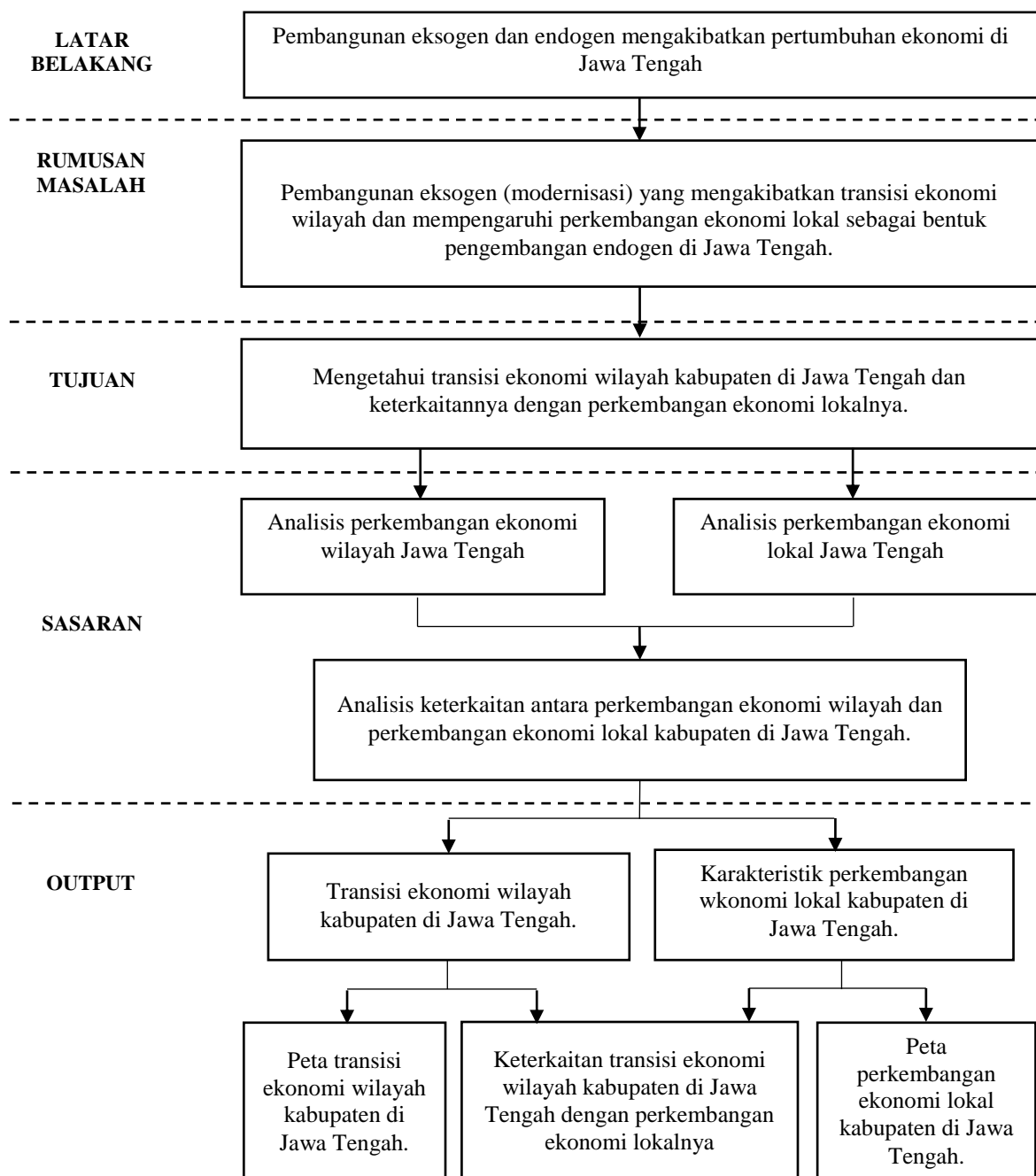
Sumber : Analisis Penyusun, 2015

1.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu bagan yang menggambarkan alur pikir peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka pikir memuat inti-inti dari bagian-bagian penelitian, yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sasaran penelitian, serta output atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilatar belakangi dari kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh semua daerah di Indonesia. Agar pembangunan ekonomi tersebut berkelanjutan, maka faktor-faktor pembangunan tersebut harus berasal dari dalam wilayah atau juga disebut pembangunan endogen. Hal tersebut untuk menyeimbangkan pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar (eksogen). Salah satu wilayah di Indonesia yang cukup berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi wilayah dan pembangunan endogen adalah Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dijadikannya Jawa Tengah sebagai wilayah percontohan pengembangan ekonomi lokal bagi wilayah lain di Indonesia.

Pembangunan merupakan proses modernisasi. Pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang dilakukan, menciptakan aktivitas ekonomi Jawa Tengah yang semakin beragam dan dinamis. Sektor industri dan jasa di Jawa Tengah semakin berkembang. Hal ini, tentunya akan menumbuhkan perekonomian wilayah Jawa Tengah tersebut. Sehingga terjadi pula perkembangan ekonomi wilayah yang dapat dilihat dari perubahan struktur ekonomi atau transisi ekonomi yang berpengaruh pada eksistensi perkembangan ekonomi lokal sebagai perwujudan pembangunan endogen di Jawa Tengah. Menurut Names (2005), bentuk dari pembangunan endogen adalah industri lokal. Sehingga yang menjadi objek penelitian perkembangan ekonomi lokal pada penelitian ini adalah industri kecil dan menengah (IKM).

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi lokalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang perlu dilakukan ada tiga, yaitu (1) menganalisis karakteristik perkembangan ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah, (2) menganalisis perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah dan (3) menganalisis keterkaitan antara transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah. Dari ketiga sasaran tersebut, output yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah, mengetahui karakteristik perkembangan ekonomi lokal, serta mengetahui hubungan antara keduanya. Selanjutnya, dibuat peta transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal Jawa Tengah agar dapat mengetahui persebaran karakteristik perkembangan ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokalnya secara keruangannya. Berikut adalah Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir penelitian ini.



Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Gambar 1. 2
Kerangka Pikir

1.8 Metode Penelitian

Nazir dalam Yunus (2010) mendefinisikan survei adalah suatu penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan, baik secara faktual mengenai institusi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok ataupun daerah, dan hal ini bisa dilakuakn secara sensus ataupun menggunakan sampel. Sedangkan metode survei adalah adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar variabel

mengenai sejumlah besar individu melalui alat pengukur wawancara (Vredenburg dalam Yunus, 2010). Yunus (2010) menjelaskan ada dua jenis metode survei berdasarkan hubungannya dengan data yang digunakan dalam analisis, yaitu metode survei deskriptif dan metode survei analitik. Metode survei deskriptif berhubungan dengan data yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode survei analitik menggunakan data dan alat bantu analisis yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini bersifat kuantitatif, sehingga menggunakan metode survei analitik. Peneliti melakukan survei untuk memperoleh data statistik yang faktual yang dibutuhkan dalam melakukan analisis. Kegiatan survei yang akan dilakukan adalah survei instansi. Ada tiga instansi pemerintah yang di survei untuk mendapatkan data-data penelitian yaitu Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah; serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam penelitian Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen. Telaah dokumen merupakan teknik memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen-dokumen yang ditelaah untuk mendukung penelitian ini antara lain adalah Jawa Tengah dalam Angka, Kabupaten dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Jawa Tengah, Statistik Industri Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Keragaan Koperasi Kota/ Kabupaten se-Jawa Tengah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dilakukan telaah dokumen-dokumen statistik yang telah dibuat oleh instansi pemerintah, sehingga data yang digunakan bersifat resmi dan valid.

1.8.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini cukup banyak, karena pada setiap variabel tidak hanya menggunakan satu data. Sedangkan penelitian ini memiliki empat variabel dan memiliki ruang lingkup dua puluh sembilan kabupaten di Jawa Tengah. Sehingga perlu dibuat pengelompokan data yang bertujuan untuk memudahkan dalam menstrukturkan data dan memudahkan dalam proses analisisnya. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini juga akan tersusun dengan rapi. Data penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan dengan variabel, nama data, tipe data, tahun dari data yang dibutuhkan, sumber data, dan cara memperoleh data tersebut. Selain data yang dibutuhkan dalam menganalisis menggunakan variabel yang ditentukan, juga dibutuhkan informasi atau fakta yang mendukung hasil temuan penelitian. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tabel data penelitian yang digunakan dalam proses analisis penelitian ini.

Tabel I.2
Data Penelitian

Variabel	Nama Data	Tipe Data	Tahun Data	Sumber Data	Cara Pengumpulan
Struktur ekonomi	Jumlah produksi sektor pertanian setiap kabupaten di Jawa Tengah.	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah.	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah tenaga kerja sektor pertanian setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah penduduk usia produktif setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
Urbanisasi	Jumlah penduduk perkotaan setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah penduduk setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Luas lahan terbangun setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
IKM	Nilai produksi IKM setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	Disperindag	Telaah Dokumen
	Nilai produksi IKM Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	Disperindag	Telaah Dokumen
	Jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah.	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah produksi PDRB Jawa Tengah.	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah tenaga kerja IKM setiap kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	Disperindag	Telaah Dokumen
	Jumlah tenaga kerja IKM Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	Disperindag	Telaah Dokumen
	Jumlah penduduk usia produktif Jawa Tengah	Numerik	2000, 2010	BPS	Telaah Dokumen
Lembaga keuangan mikro	Nilai volume usaha koperasi kabupaten di Jawa Tengah	Numerik	2010, 2015	Dinkop & UMKM	Telaah Dokumen
	Nilai volume usaha koperasi Jawa Tengah	Numerik	2010, 2015	Dinkop & UMKM	Telaah Dokumen
	Jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah.	Numerik	2010, 2015	BPS	Telaah Dokumen
	Jumlah produksi PDRB Jawa Tengah	Numerik	2010, 2015	BPS	Telaah Dokumen

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

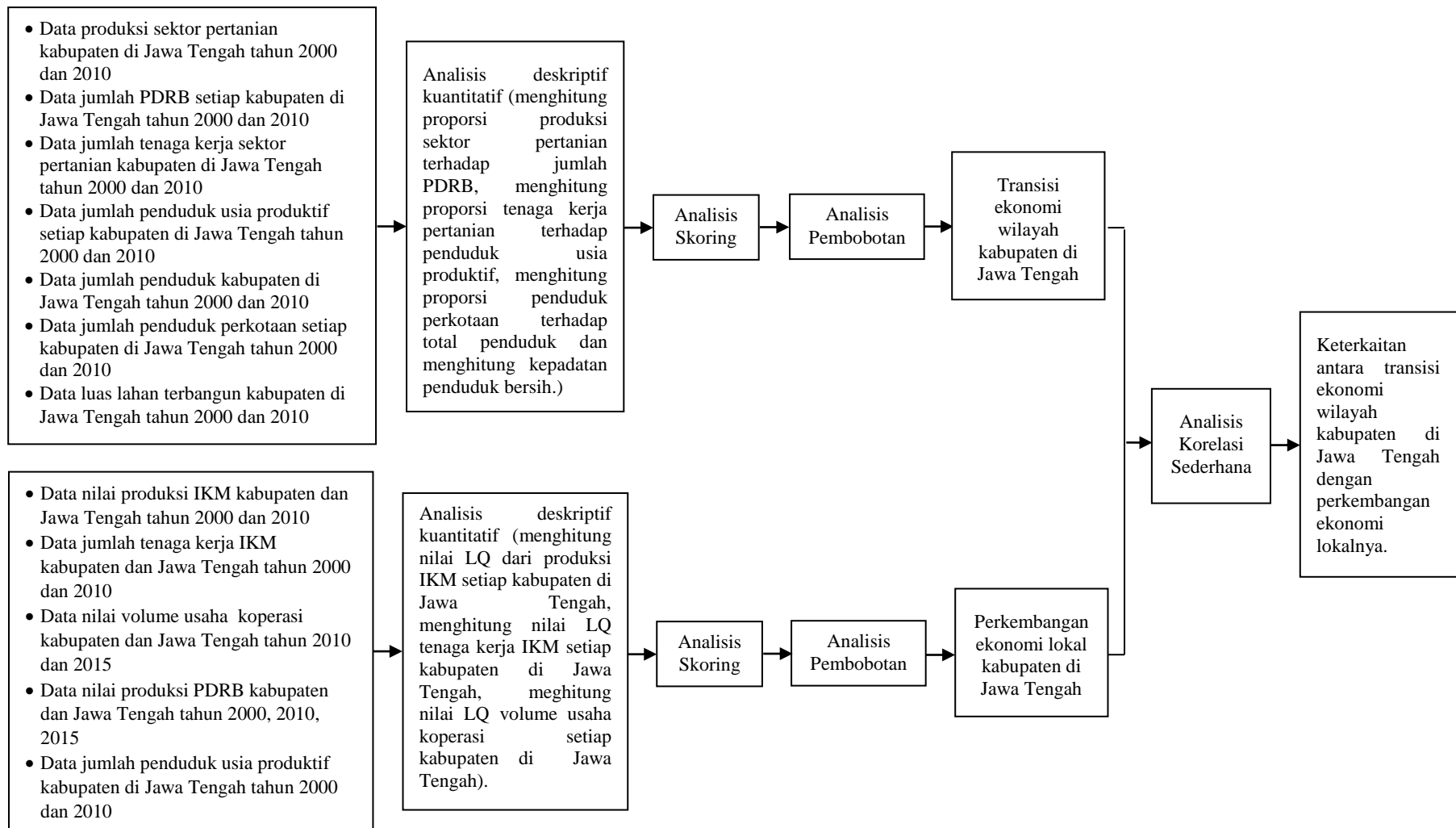
1.8.3 Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan bagan yang berisi rangkaian sistematis dalam melakukan analisis data yang telah diperoleh. Bagan tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu input, proses dan output. Input merupakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan proses merupakan kegiatan analisis yang dilakukan. Input dari analisis perkembangan ekonomi lokal untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah berupa data jumlah

produksi sektor pertanian masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah produksi PDRB masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah tenaga kerja sektor pertanian masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk usia produktif masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk total kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk perkotaan masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, dan data luas lahan terbangun masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan input untuk menganalisis perkembangan ekonomi lokal adalah data nilai produksi IKM kabupaten di Jawa Tengah, data nilai produksi IKM Provinsi Jawa Tengah, data jumlah produksi PDRB kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah produksi PDRB Jawa Tengah, data jumlah tenaga kerja IKM kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah tenaga kerja IKM Jawa Tengah, data jumlah penduduk usia produktif kabupaten di Jawa Tengah, data jumlah penduduk usia produktif Jawa Tengah, data nilai produksi koperasi kabupaten di Jawa Tengah serta data nilai produksi koperasi Jawa Tengah secara keseluruhan termasuk enam kotanya. Semua data tersebut merupakan data tahun 2000 dan 2010. Kecuali untuk data koperasi menggunakan data tahun 2010 dan 2015, dikarenakan ketersediaan data koperasi yang ada.

Dari data tersebut kemudian dilakukan proses analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah adalah menghitung proporsi jumlah produksi sektor pertanian dalam PDRB kabupaten di Jawa Tengah, menghitung proporsi jumlah tenaga kerja sektor pertanian terhadap jumlah penduduk usia produktif kabupaten di Jawa Tengah, menghitung proporsi jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk total masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah menghitung kepadatan penduduk bersih yaitu dengan membagi jumlah penduduk total dengan luas lahan terbangun masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan analisis deskriptif untuk mengetahui perkembangan ekonomi lokal yaitu dengan menghitung nilai LQ dari produksi IKM, tenaga kerja IKM dan volume usaha koperasi, dengan cara membandingkan rasio data masing-masing kabupaten dengan rasio data Jawa Tengah secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis skoring dan analisis pembobotan. Dari proses analisis tersebut, menghasilkan output yaitu transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal Jawa Tengah.

Selanjutnya, hasil analisis transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal digunakan untuk melakukan analisis korelasi. Analisis korelasi ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan transisi ekonomi wilayah dengan perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah. Apabila terjadi transisi ekonomi wilayah apakah perkembangan ekonomi lokalnya juga berkembang, atau sebaliknya. Gambar 1.3 berikut ini adalah Kerangka Analisis dari penelitian Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya.



Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Gambar 1.3
Kerangka Analisis

1.8.4 Tahapan Pengolahan Data

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, data-data yang telah diperoleh tentunya harus diolah. Dalam proses pengolahan, penelitian Perkembangan Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, analisis skoring, analisis pembobotan dan analisis korelasi sederhana.

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Sugiono (2008), metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan secara konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiono, 2008). Jadi, dapat diartikan bahwa analisis deskriptif adalah kegiatan menganalisis dengan cara mendiskripsikan data-data yang berupa fakta atau angka yang terukur, objektif, dan kongkrit.

Pada penelitian ini, untuk dapat mengetahui transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah serta perkembangan ekonomi lokalnya dibutuhkan variabel dan indikator-indikator penentu pada setiap tahapan perkembangan ekonomi wilayah dan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah. Pada Tabel I.3 dijelaskan indikator-indikator penentu tahapan pertumbuhan ekonomi dalam transisi ekonomi, yang telah disusun sesuai dengan variabel dan subvariabel yang disesuaikan dengan Teori Tahapan Pertumbuhan Ekonomi oleh Rostow yang menjadi landasannya. Sedangkan untuk indikator-indikator penentu perkembangan ekonomi lokal dijabarkan pada Tabel I.4. Indikator tersebut juga disesuaikan dengan Teori Perkembangan Ekonomi Lokal Coffey dan Polese.

Analisis pertama yang dilakukan adalah mencari proporsi sektor maupun subsektor yang dianggap penting dalam struktur ekonomi. Pada perkembangan wilayah, yang dianggap sebagai sektor acuan adalah sektor pertanian. Karena sektor pertanian merupakan sektor basis pada awal pembentukan wilayah. Definisi dari transisi ekonomi wilayah pun menyebutkan bahwa jika terjadi pergeseran sektor basis dari pertanian menjadi sektor industri maupun jasa, maka wilayah tersebut dapat dikatakan mengalami transisi. Oleh karena itu, pada Tabel I.3 dijabarkan bahwa untuk mengetahui transisi ekonomi wilayah harus menghitung proporsi produksi jumlah produksi sektor pertanian terhadap jumlah produksi PDRB, menghitung proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap jumlah penduduk usia produktif, menghitung tingkat urbanisasi yaitu dengan menghitung presentase penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk total, serta menghitung kepadatan penduduk bersih yaitu dengan membagi jumlah penduduk dengan luas lahan terbangun.

Tabel I.3
Indikator Transisi Ekonomi Wilayah Berdasarkan Teori Rostow

Transisi Ekonomi	Struktur Ekonomi		Urbanisasi	
	Sektor Pertanian	Tenaga Kerja	Tingkat Urbanisasi	Kepadatan Penduduk
Masyarakat Tradisional	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB di atas 75%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif diatas 75%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk dibawah 10%	Kepadatan penduduk bersih kurang dari 50 jiwa/ha
Prasyarat Tinggal Landas	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 50% - 75%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif lebih dari 50% - 75%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 10% - 25%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 50 – 150 jiwa/ ha
Tinggal Landas	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 30% - 50%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif kurang dari lebih dari 30% - 50%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 25% - 60%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 150 – 200 jiwa/ha
Menuju Kedewasaan	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB lebih dari 10% - 30%	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif lebih dari 10% - 30%	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 60% - 80%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 200 – 400 jiwa/ha
Konsumsi Masal	Proporsi sektor pertanian terhadap PDRB 10% atau kurang	Proporsi tenaga kerja sektor pertanian terhadap penduduk usia produktif 10% atau kurang	Proporsi penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk lebih dari 80%	Kepadatan penduduk bersih lebih dari 400 jiwa/ ha

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Analisis perkembangan ekonomi lokal kabupaten di Jawa Tengah dengan menggunakan landasan teori perkembangan ekonomi lokal oleh Coffey dan Polese. Teori ini digunakan untuk menentukan tahapan perkembangan ekonomi lokal dan variabel yang digunakan dalam analisis. Pada analisis yang perkembangan ekonomi lokal ini, menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). *Location Quotient* (LQ) adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional (Tarigan, 2007). Analisis LQ dipilih karena LQ merupakan alat analisis untuk mengetahui sektor unggulan. Sedangkan dalam penelitian ini, IKM diasumsikan sebagai produk unggulan dari pengembangan ekonomi lokal suatu daerah. Sesuai dengan teori Coffey dan Polese, perkembangan ekonomi lokal suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan perusahaan lokalnya. Dengan menggunakan LQ lebih mudah untuk menentukan kriteria perkembangan ekonomi lokal karena LQ hanya ada dua kriteria, yaitu $LQ < 1$ dan $LQ \geq 1$. Karena dalam teori perkembangan ekonomi lokal Coffey dan Polese ada empat tahap, maka kriteria LQ tersebut pun dibagi empat. Pada tahap pertamaperkembangan ekonomi lokal nilai LQ kurang dari 0,5; tahap kedua yaitu ekspansi perusahaan lokal nilai LQ antara 0,5 hingga 1; tahap ketiga yaitu munculnya struktur kontrol lokal memiliki nilai LQ yaitu 1 hingga 2; dan tahap keempat yaitu kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah memiliki nilai LQ lebih dari 2. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel I.4 berikut ini.

Tabel I.4
Indikator Perkembangan Ekonomi Lokal Berdasarkan Teori Coffey dan Polèse

Perkembangan Ekonomi Lokal	Industri Kecil Menengah		Lembaga Keuangan Mikro
	Nilai Produksi	Tenaga Kerja	
Munculnya wirausaha Lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa bernilai kurang dari 0,5.	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah bernilai kurang dari 0,5.	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah bernilai kurang dari 0,5.
Ekspansi perusahaan lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah bernilai 0,5- 1.	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah 0,5- 1.	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah bernilai 0,5- 1.
Munculnya struktur kontrol lokal	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah bernilai 1 - 2	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah bernilai 1 - 2	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah bernilai 1 - 2
Kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah.	Rasio nilai produksi IKM kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio produksi IKM Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah di atas 2	Rasio tenaga kerja IKM kabupaten terhadap penduduk usia produktif kabupaten dibandingkan dengan rasio tenaga kerja IKM Jawa Tengah terhadap penduduk usia produktif Jawa Tengah di atas 2	Rasio volume usaha koperasi kabupaten terhadap PDRB kabupaten dibandingkan dengan rasio volume usaha koperasi Jawa Tengah terhadap PDRB Jawa Tengah di atas 2

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

b. Analisis Skoring

Metode skoring adalah suatu metode analisis dengan memberi skor atau nilai masing-masing parameter untuk menentukan tingkat kemampuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Sholahuddin, 2015). Dalam penelitian ini, analisis skoring yang dilakukan adalah memberikan ranking atau skor pada tahapan transisi ekonomi dan tahapan perkembangan ekonomi lokal. Skor terendah diberikan pada tahapan yang paling awal, sedangkan skor tertinggi diberikan pada tahapan yang paling akhir. Hal tersebut dikarenakan tahapan paling akhir merupakan kondisi yang terbaik yang ingin dicapai suatu wilayah. Pada transisi ekonomi wilayah, ada lima tahap, sehingga tahap pertama yaitu masyarakat tradisional diberi skor 1, sedangkan tahapan paling akhir diberi skor tertinggi yaitu 5. Sedangkan pada perkembangan ekonomi lokal, ada empat tahap perkembangan. Jadi, pada tahap pertama yaitu munculnya kewirausahaan lokal diberi skor 1 dan tahap keempat yaitu kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah diberi skor 4.

Pemberian skor transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal secara jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel I.5
Skor Transisi Ekonomi Wilayah

Tahap	Transisi Ekonomi	Skor
1	Masyarakat Tradisional	1
2	Prasyarat Tinggal Landas	2
3	Tinggal Landas	3
4	Menuju Kedewasaan	4
5	Konsumsi Masal	5

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Tabel I.6
Skor Perkembangan Ekonomi Lokal

Tahap	Transisi Ekonomi	Skor
1	Munculnya wirausaha Lokal	1
2	Ekspansi perusahaan lokal	2
3	Kontrol lokal terhadap aktivitas perusahaan	3
4	Kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah.	4

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

c. Analisis Pembobotan

Analisis pembobotan atau yang juga disebut *weighting analysis* merupakan suatu metode analisis yang digunakan apabila proses analisis melibatkan beberapa variabel, sedangkan pada setiap variabel memiliki peran atau nilai kepentingan yang berbeda (Sholahuddin, 2015). Pembobotan dapat dilakukan secara objektif dengan perhitungan statistik atau dengan cara subjektif, namun pembobotan secara subjektif ini harus berdasarkan pada pemahaman suatu proses yang bersangkutan. Pada penelitian ini, analisis pembobotan yang dilakukan adalah secara subjektif, karena pembobotan dilakukan berlandaskan pemahaman teori dan bukan perhitungan statistik. Landasan yang digunakan dalam pembobotan ini adalah teori pertumbuhan ekonomi Rostow dan teori perkembangan ekonomi lokal Coffey and Polèse.

Variabel yang digunakan untuk menganalisis transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal memiliki bobot yang tidak sama. Pada transisi ekonomi wilayah, Rostow menjelaskan bahwa bobot variabel struktur ekonomi lebih tinggi di bandingkan variabel urbanisasi. Bahkan masing-masing subvariabelnya memiliki bobot yang berbeda (sektor pertanian, tenaga kerja, penduduk perkotaan dan kepadatan penduduk bersih). Begitu pula pada perkembangan ekonomi lokal, variabel industri kecil dan menengah lebih penting daripada variabel lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu dilakukan analisis pembobotan variabel dan subvariabel. Jumlah bobot dari variabel transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal hasilnya adalah 100% atau 1.

Tabel I.7
Nilai Bobot Variabel Transisi Ekonomi Wilayah

Bobot	Sub Variabel	Variabel
35%	Sektor pertanian	Struktur ekonomi
30%	Tenaga kerja	
20%	Tingkat Urbanisasi	Urbanisasi
15%	Kepadatan penduduk bersih	

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Variabel struktur ekonomi memiliki dua sub variabel yaitu sektor pertanian dan tenaga kerja. Walaupun dalam satu variabel, tetapi tingkat kepentingannya berbeda. Sektor pertanian memiliki bobot yang paing tinggi diantara lainnya yaitu 35% (0,35). Sedangkan subvariabel tenaga kerja diberi bobot 30% (0,3). Dalam teori Rostow dijelaskan bahwa urbanisasi digunakan untuk menegetahui transisi ekonomi wilayah, namun bobotnya dibawah variabel struktur ekonomi. Jadi, subvaribel tingkat urbanisas dan kepadatan penduduk diberi bobot 20% (0,2) dan 15% (0,15).

Tabel I.8
Nilai Bobot Variabel Perkembangan Ekonomi Lokal

Bobot	Sub Variabel	Variabel
50%	Produksi IKM	Industri kecil dan menengah
30%	Tenaga kerja IKM	
20%	Lembaga keuangan mikro	Lembaga keuangan mikro

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Hal tersebut juga dilakukan terhadap perkembangan ekonomi lokal. Variabel yang digunakan dalam mengetahui perkembangan ekonomi lokal ada dua, yaitu variabel industri kecil dan menengah (IKM) dan variabel lembaga keuangan mikro. Variabel IKM memiliki subvariabel yaitu produksi IKM dan tenaga kerja IKM. Produksi IKM memiliki tingkat kepentingan paling tinggi, sehingga diberi bobot 50% (0,5). Sedangkan subvariabel tenaga kerja IKM diberi bobot 30% (0,3) karena memiliki tingkat kepentingan di bawah produksi IKM dan diatas lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro yang memiliki tingkat kepentingan paling rendah pada analisis perkembangan ekonomi lokal diberi skor 20% (0,2).

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan dari hasil perkalian skor dan bobot. Jika indikator struktur ekonomi terpenuhi, indikator ketenagakerjaan terpenuhi dan indikator urbanisasi terpenuhi, maka penjumlahan hasil dari perkalian skor dan bobot setiap indikator yang paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 5. Hasil penjumlahan dari perkalian skor dan bobot kemungkinan besar bukan merupakan bilangan bulat. Sehingga tidak dapat langsung mengkategorikan ke dalam tahap 1, 2, 3, 4 atau 5 pada transisi ekonomi ataupun tahap 1, 2, 3 atau 4 pada tahap perkembangan ekonomi lokal sesuai dengan hasil pembobotan yang didapat. Sehingga dibutuhkan *range* nilai hasil perkalian analisis skoring dan pembobotan untuk mengetahui tahapan transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokalnya. Nilai akhir analisis transisi ekonomi minimal yaitu 1 dan

maksimalnya 5. Transisi Ekonomi menurut Rostow ada lima tahap, sehingga dibuat lima kelas dengan jarak nilai yang sama yaitu 0,8. Sedangkan perkembangan ekonomi lokal ada empat tahap, sehingga dibuat empat kelas dengan jarak nilai yang telah ditentukan pula yaitu 0,75. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.9 dan Tabel I.10 yang menjelaskan nilai masing-masing kelas transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal.

Tabel I.9
Nilai Kelas Tahap Transisi Ekonomi

Tahap	Transisi Ekonomi	Nilai Kelas
1	Masyarakat Tradisional	1 – 1,8
2	Prasyarat Tinggal Landas	1,8 – 2,6
3	Tinggal Landas	2,6 – 3,4
4	Menuju Kedewasaan	3,4 – 4,2
5	Konsumsi Masal	4,2 - 5

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

Tabel I.10
Nilai Kelas Perkembangan Ekonomi Lokal

Tahap	Perkembangan Ekonomi Lokal	Nilai Kelas
1	Munculnya wirausaha Lokal	1 – 1,75
2	Ekspansi perusahaan lokal	1,75 – 2,5
3	Munculnya struktur kontrol lokal	2,5 – 3,25
4	Kontrol lokal yang kuat terhadap sektor ekonomi daerah	3,25 - 4

Sumber: Analisis Penyusun, 2016

d. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal. Walaupun ekonomi lokal merupakan bagian dari ekonomi wilayah, namun harus tetap dilakukan analisis ini untuk benar-benar memastikan pengaruh ekonomi lokal terhadap ekonomi wilayah. Apakah pengaruh perkembangan ekonomi lokal signifikan atau tidak terhadap transisi ekonomi wilayah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan diagram pencar atau *scatter plot*. *Scatter plot* adalah gambar berupa grafik digunakan untuk menganalisis pola kemungkinan hubungan (korelasi) antara dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut melalui persebaran titik-titik variabelnya (Wijaya, 2005). *Scatter plot* biasanya digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dari dua variabel.

Pada analisis korelasi menggunakan diagram pencar ini, sumbu x merupakan variabel penyebab. Dalam penelitian ini, variabel penyebab adalah perkembangan ekonomi lokal. Sedangkan sumbu y merupakan variabel akibat, yaitu variabel transisi ekonomi wilayah. Panjang sumbu y pada transisi ekonomi adalah 5, karena ada lima tahap dalam transisi ekonomi wilayah sesuai landasan teori. Sedangkan panjang sumbu x pada perkembangan ekonomi lokal adalah 4, sesuai dengan tahapan perkembangan ekonomi lokal Coffey dan Polese. Kemudian pada Gambar

1.4 merupakan diagram pencar (*scatter plot*) transisi ekonomi dan perkembangan ekonomi lokal diisi dengan dua puluh sembilan titik yang mewakili kabupaten di Jawa Tengah. Pola persebaran titik-titik tersebut akan menggambarkan hubungan transisi ekonomi wilayah dan perkembangan ekonomi lokal. Dalam menentukan hubungan keterkaitan transisi ekonomi wilayah kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan ekonomi lokalnya, mengacu pada Tabel I.11 berikut ini.

Tabel I.11
Korelasi Dua Variabel Berdasarkan Pola Persebaran Titik

Pola Persebaran Titik	Hubungan	Interpretasi
Membentuk garis lurus, yang condong (miring) ke kanan	Linier positif	Jika nilai variabel x meningkat, maka nilai variabel y juga meningkat. Jika nilai variabel x menurun, maka nilai variabel y juga turun.
Membentuk garis lurus, yang condong (miring) ke kiri	Linier Negatif	Jika nilai variabel x meningkat, maka nilai variabel y menurun. Jika nilai variabel x menurun, maka nilai variabel y meningkat.
Menyebar atau mengelompok	Tidak memiliki hubungan	Tidak ada hubungan sebab – akibat dari dua variabel yang dianalisis.
Membentuk garis lengkung	Non linier	Hubungan kedua variabel fluktuatif

Sumber: [sites.google.com](https://www.google.com) dan Analisis Penyusun, 2016

Dalam melakukan analisis ini, menggunakan bantuan *software* SPSS. Selain mengetahui pola persebarannya, juga dapat diketahui nilai koefisien determinannya (R^2). Dengan mengetahui nilai R^2 , dapat diketahui juga nilai koefisien korelasinya (r). Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan kuantitas kekuatan hubungan antara dua variabel yang dikaji tersebut. Nilai koefisien korelasi paling tinggi adalah 1 dan paling rendah -1. Variabel yang memiliki korelasi linier positif memiliki nilai r positif. Sedangkan variabel yang memiliki korelasi negatif memiliki nilai r negatif. Sedangkan r bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel. Berikut adalah kriteria hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasinya.

Tabel 1.12
Kriteria Hubungan Berdasarkan Nilai Koefisien Korelasi

Nilai Koefisien Korelasi (r)	Kriteria Hubungan
0	Tidak ada korelasi
0 – 0,5	Korelasi lemah
0,5 -0,8	Korelasi sedang
0,8 - 1	Korelasi kuat/ erat
1	Korelasi sempurna

Sumber: <http://teknikelektronika.com/>

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan laporan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir yang berjudul Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Berisikan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka teori, dan pertanyaan penelitian. Sub bab ini berisi teori-teori dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan penelitian serta yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

BAB III KARAKTERISTIK PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH JAWA TENGAH

Pada bab ini membahas mengenai kondisi perkembangan ekonomi wilayah di Jawa Tengah. Meliputi kondisi geografis, kependudukan dan ketenagakerjaan; serta kondisi perekonomian Jawa Tengah. Baik struktur ekonominya, industri kecil dan menengah (IKM) serta lembaga keuangan mikro yang ada di Jawa Tengah.

BAB IV ANALISIS TRANSISI EKONOMI WILAYAH KABUPATEN DI JAWA TENGAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Bab ini membahas tentang proses analisis data yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan membahas mengenai temuan-temuan dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan studi, serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai studi lanjutan di waktu yang akan datang dan bahan perencanaan perekonomian daerah.